

Masihkah Semangat Sumpah Pemuda Nyata?

Sumpah Pemuda yang diperingati setiap 28 Oktober merupakan tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Tiga butir utamanya—satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa—menjadi landasan utama dalam membangun identitas nasional dan semangat persatuan di tengah keberagaman. Nilai-nilai tersebut lahir dari kesadaran kolektif para pemuda pada Kongres Pemuda II tahun 1928, bahwa hanya melalui persatuanlah bangsa Indonesia mampu menghadapi penjajahan dan mewujudkan kemerdekaan.

Namun, di era globalisasi dan digital saat ini, muncul pertanyaan besar: sejauh mana semangat tersebut masih hidup di kalangan generasi muda? Pemuda masa kini tidak lagi menghadapi penjajahan fisik, tetapi tantangan baru seperti polarisasi sosial, dominasi budaya asing, dan keterikatan pada ruang digital. Media sosial mempercepat penyebaran ide, tetapi juga memperuncing perbedaan dan memicu konflik identitas.

Esai ini bertujuan untuk mengevaluasi relevansi nilai-nilai Sumpah Pemuda di era modern. Dengan membandingkan idealisme historis dengan kenyataan kontemporer, serta menyoroti peran figur muda, lembaga pendidikan, dan kebijakan pemerintah, pembahasan ini akan menggambarkan sejauh mana semangat Sumpah Pemuda masih nyata dan dapat dibumikan dalam kehidupan generasi sekarang.

Sumpah Pemuda mengusung semangat ideal: bahwa perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya dapat disatukan dalam identitas kebangsaan yang tunggal. “Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa” menjadi seruan integratif yang melampaui sekat-sekat primordial demi memperkuat solidaritas nasional. Nilai ini menegaskan bahwa Indonesia dibangun atas dasar persatuan dalam keberagaman.

Namun, dalam realitas masa kini, semangat itu sering kali diuji oleh fragmentasi sosial yang muncul melalui berbagai platform digital. Media sosial telah menjadi ruang interaksi utama bagi generasi muda, namun juga menjadi lahan subur bagi perpecahan. Perbedaan pendapat kerap memicu saling ejek, penyebaran ujaran kebencian, hingga praktik cancel culture. Polarisasi politik, terutama menjelang

tahun-tahun pemilu, menunjukkan bagaimana identitas kelompok dapat menenggelamkan semangat kebangsaan.

Dulu, nasionalisme menyatukan para pemuda dalam satu gerakan melawan penjajahan. Kini, tanpa ancaman luar yang jelas, perpecahan justru muncul dari dalam, diperparah oleh minimnya literasi digital dan lemahnya pendidikan karakter. Untuk itu, penting bagi generasi muda menghidupkan kembali etika dialog, empati sosial, dan semangat kolektif agar idealisme Sumpah Pemuda tetap relevan dan hidup.

Globalisasi telah membawa dunia pada keterhubungan lintas batas yang semakin intens, termasuk dalam arus budaya, informasi, dan gaya hidup. Pemuda Indonesia kini tumbuh dalam era digital yang didominasi oleh tren global, budaya populer Barat, serta hegemoni budaya Korea, Jepang, dan lainnya. Tayangan Netflix, musik K-pop, mode gaya hidup ala Barat, dan bahasa Inggris yang semakin dominan dalam percakapan sehari-hari, menjadi bukti betapa kuatnya pengaruh global terhadap generasi muda.

Data dari survei perilaku remaja Indonesia yang dikaji oleh Suwarno (2023) menunjukkan bahwa 68% remaja lebih mengenal artis luar negeri dibandingkan pahlawan nasional. Di media sosial, fenomena *idol worship*, penggunaan bahasa campuran, serta adopsi budaya asing dalam keseharian mencerminkan pergeseran identitas yang signifikan. Media sosial seperti TikTok dan Instagram bahkan mendorong penciptaan "identitas global" yang seringkali mengaburkan rasa memiliki terhadap budaya sendiri.

Meskipun keterbukaan terhadap budaya asing bukanlah hal yang salah, ketiadaan filter kritis terhadap identitas lokal membuat generasi muda rentan kehilangan pijakan nilai-nilai kebangsaan. Di sinilah nasionalisme menghadapi ujian nyata: bertahan atau larut dalam arus global.

Dalam konteks globalisasi, nasionalisme bukan lagi sekadar slogan yang digaungkan setiap 28 Oktober, melainkan suatu sikap mental yang menuntut pembaruan dan adaptasi. Namun, di tengah arus budaya asing dan derasnya

informasi, nasionalisme di kalangan pemuda sering kali terlihat kabur. Banyak yang memahami cinta tanah air secara dangkal—sebatas simbolik seperti unggahan bendera saat Hari Kemerdekaan atau mengikuti lomba bertema nasionalisme, tanpa pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai kebangsaan.

Suwarno (2023) mencatat adanya kecenderungan meningkatnya individualisme digital, di mana pemuda lebih tertarik membangun *personal branding* di media sosial ketimbang berkontribusi dalam kegiatan kolektif yang memperkuat kebangsaan. Nasionalisme pun tereduksi menjadi tren sesaat—bukan sebagai prinsip yang mengakar. Misalnya, kampanye cinta produk lokal hanya berlangsung saat ada isu nasionalisme ekonomi, tapi tidak dibarengi dengan perilaku konsumtif yang konsisten terhadap karya anak bangsa.

Hal ini diperparah oleh lemahnya sistem pendidikan yang kadang gagal menanamkan makna substansial dari nasionalisme. Jika tidak ada strategi penguatan dari lembaga formal dan nonformal, maka nasionalisme akan terus tergerus oleh budaya instan dan konsumtif yang ditawarkan globalisasi.

Agar nasionalisme tetap tumbuh subur di tengah generasi muda, dibutuhkan strategi revitalisasi yang kontekstual dan berkesinambungan. Salah satu pendekatan yang efektif adalah penguatan pendidikan karakter di sekolah melalui kurikulum berbasis nilai, kegiatan literasi sejarah, dan pelibatan aktif siswa dalam proyek sosial. Sekolah-sekolah seperti SMA Kolese De Britto di Yogyakarta menjadi contoh bagaimana pendidikan bisa menjadi alat transformatif untuk membangun kesadaran kebangsaan melalui pendekatan kritis, kreatif, dan empatik.

Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler seperti organisasi siswa, komunitas literasi, forum diskusi lintas budaya, dan gerakan sosial berbasis isu lokal dapat menjadi ruang konkret pembelajaran nasionalisme. Tak kalah penting adalah peran figur inspiratif—baik tokoh nasional masa lalu maupun pemuda masa kini—yang dapat menjadi teladan tentang bagaimana nasionalisme bisa diwujudkan dalam tindakan, bukan hanya retorika.

Pemerintah juga memiliki peran vital dengan menciptakan kebijakan yang mendukung keterlibatan pemuda dalam pembangunan nasional, seperti program magang nasional, pelatihan kepemimpinan daerah, dan pemberdayaan komunitas lokal berbasis teknologi. Nasionalisme di era global tidak menolak budaya asing, tapi menegaskan kembali jati diri bangsa di tengah arus dunia.

Bahasa Indonesia memiliki peran sentral dalam sejarah kebangsaan, sebagaimana ditegaskan dalam butir ketiga Sumpah Pemuda: “Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.” Pada saat itu, pemilihan Bahasa Indonesia—yang berakar dari bahasa Melayu—bukan hanya keputusan praktis, tetapi juga simbol politik dan budaya untuk menciptakan identitas nasional yang menyatukan keberagaman etnis, daerah, dan bahasa lokal.

Fungsi pemersatu Bahasa Indonesia sangat terasa dalam proses kemerdekaan dan pembentukan negara. Bahasa ini menjadi media komunikasi yang menjembatani aspirasi rakyat dari Sabang sampai Merauke. Hingga kini, Bahasa Indonesia tetap menjadi alat integrasi nasional yang memungkinkan semua warga negara berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, menjaga kelestarian dan kedudukan Bahasa Indonesia tidak hanya penting dari sisi linguistik, tetapi juga sebagai bagian dari mempertahankan identitas dan persatuan bangsa.

Namun, di era digital, Bahasa Indonesia menghadapi tantangan serius, terutama dari pengaruh bahasa gaul dan interferensi bahasa asing. Generasi muda kini banyak menggunakan istilah-istilah slang dalam percakapan sehari-hari, baik lisan maupun tulisan di media sosial. Frasa seperti “literally gak kuat,” “bestie,” “healing ke Bali,” hingga “gaskeun” menjadi bagian dari komunikasi remaja masa kini yang semakin bercampur antara Bahasa Indonesia dan bahasa asing, terutama Inggris.

Menurut laporan Suwarno (2023) dan data dari *Language Center UNJ*, fenomena ini berdampak pada menurunnya apresiasi terhadap Bahasa Indonesia yang baku. Banyak pelajar yang mulai kesulitan menggunakan Bahasa Indonesia secara formal, baik dalam penulisan akademik maupun komunikasi profesional. Media

sosial memperkuat tren ini dengan algoritma yang mendukung konten ringan, ekspresif, dan trendi, sehingga Bahasa Indonesia yang santun, runtut, dan kaya struktur justru semakin jarang digunakan.

Meskipun perkembangan bahasa merupakan hal yang wajar dan dinamis, dominasi bahasa campuran tanpa pemahaman kritis berpotensi mengikis kedalaman berpikir dan ekspresi kebudayaan. Jika dibiarkan tanpa panduan dan pembinaan, generasi muda dapat kehilangan kemampuan untuk menggunakan Bahasa Indonesia sebagai alat berpikir dan alat perjuangan kultural.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi pelestarian Bahasa Indonesia yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Kampanye literasi bahasa yang kreatif dan berbasis media digital perlu digencarkan oleh lembaga pendidikan, pemerintah, serta komunitas pegiat bahasa. Misalnya, gerakan menulis blog atau esai dalam Bahasa Indonesia, lomba vlog berbahasa baku, hingga penggunaan konten kreatif seperti podcast dan video edukatif bisa menjadi cara menarik generasi muda.

Sekolah juga memiliki peran penting dengan memasukkan pembelajaran Bahasa Indonesia kontekstual, yang tidak hanya fokus pada kaidah, tetapi juga pada apresiasi karya sastra dan ekspresi kreatif. Pelibatan siswa dalam proyek penerjemahan, pementasan drama, dan penulisan fiksi bisa memperkuat rasa bangga terhadap bahasa sendiri.

Pelestarian bahasa bukan sekadar menjaga kaidah linguistik, tetapi merupakan bagian dari mempertahankan identitas nasional. Dalam konteks Sumpah Pemuda, menjunjung bahasa persatuan adalah bentuk nyata komitmen terhadap persatuan dan jati diri bangsa di era digital.

Di era digital, pemuda Indonesia menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam isu-isu sosial melalui dunia maya. Media sosial menjadi wadah utama untuk menyuarakan pendapat, membentuk opini publik, hingga mengorganisasi gerakan. Tagar seperti #GejayanMemanggil, #ReformasiDikorupsi, hingga #SavePapua menunjukkan bagaimana generasi muda mampu memanfaatkan

platform digital untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan isu yang dianggap penting.

Gerakan #GejayanMemanggil, misalnya, tidak hanya ramai di media sosial tetapi juga mendorong ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk menuntut keadilan sosial dan reformasi kebijakan publik. Contoh lain adalah kampanye #TolakOmnibusLaw yang bermula di dunia maya, namun berkembang menjadi aksi kolaboratif lintas kampus dan komunitas di berbagai daerah. Fenomena ini membuktikan bahwa aktivisme digital dapat menjadi jembatan antara kesadaran daring dan aksi nyata di lapangan. Laporan media dan pengamatan terhadap tren aktivisme menunjukkan bahwa banyak pemuda yang sangat vokal secara daring, namun belum tentu terlibat langsung dalam kegiatan sosial seperti aksi kemanusiaan, gotong royong, atau kerja sukarela. Aktivisme digital cenderung bersifat impulsif dan temporer—sering kali terbatas pada likes, share, dan komentar—tanpa komitmen jangka panjang terhadap perubahan.

Fenomena ini mencerminkan dilema generasi digital: mudah terhubung dan mudah peduli, tetapi sering kali kesulitan untuk bertransformasi menjadi agen perubahan nyata yang konsisten dan berdampak di dunia nyata.

Kritik sosial di kalangan pemuda mengalami peningkatan, terutama sejak era keterbukaan informasi dan akses terhadap media sosial. Generasi muda semakin berani mengomentari isu-isu seperti korupsi, diskriminasi, ketimpangan sosial, hingga krisis iklim. Namun, kritik yang dilontarkan sering kali tidak diimbangi dengan tindakan konkret.

Banyak pemuda aktif menulis opini atau membuat konten kritik, tetapi minim kontribusi dalam bentuk nyata seperti ikut dalam gerakan lingkungan, membantu komunitas rentan, atau terlibat dalam organisasi masyarakat sipil. Ada semacam kesenjangan antara idealisme yang tinggi dan aksi yang minim.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa sebagian besar kritik hanya menjadi ekspresi sesaat tanpa arah perubahan. Padahal, semangat Sumpah Pemuda tidak

berhenti pada kata-kata, tetapi menuntut aksi nyata demi mewujudkan persatuan dan perubahan sosial.

Untuk menjembatani kesenjangan antara kritik dan aksi, dibutuhkan ruang-ruang yang mendorong keterlibatan aktif pemuda dalam kegiatan sosial. Gerakan sukarelawan seperti Indonesia Mengajar, Aksi Cepat Tanggap, dan komunitas lokal seperti Karang Taruna telah menjadi bukti bahwa pemuda mampu memberi kontribusi nyata jika diberikan kesempatan dan dukungan.

Organisasi mahasiswa seperti BEM atau organisasi kepemudaan seperti GP Ansor juga dapat menjadi wadah untuk mengasah kepemimpinan, solidaritas, dan aksi kolektif. Selain itu, tokoh-tokoh muda yang bergerak di bidang lingkungan, pendidikan, dan sosial, seperti Isyana Bagoes Oka (aktivis perempuan dan lingkungan) atau Najelaa Shihab (pendidik dan pegiat literasi), dapat dijadikan inspirasi bagi generasi muda.

Kunci keberhasilan transformasi kritik menjadi aksi nyata adalah melalui pendidikan karakter, keteladanan, serta penciptaan ruang partisipasi yang konkret dan inklusif. Semangat Sumpah Pemuda harus dimaknai tidak hanya sebagai simbol sejarah, tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk terus bergerak dan berkontribusi.

Perkembangan teknologi dan media sosial membawa dampak signifikan terhadap cara pemuda memandang diri sendiri dan orang lain. Budaya kompetisi yang ditopang oleh algoritma media sosial mendorong individu untuk terus menonjolkan pencapaian pribadi, penampilan fisik, dan gaya hidup. Fenomena ini menghasilkan kecenderungan "pencitraan digital", yaitu upaya membentuk citra diri yang ideal demi validasi publik melalui likes, views, dan komentar.

Akibatnya, orientasi hidup sebagian pemuda lebih terfokus pada pencapaian individual daripada kontribusi terhadap komunitas. Identitas sosial pun sering dibangun di atas citra online yang belum tentu mencerminkan realitas. Budaya ini secara perlahan mengikis nilai kebersamaan dan gotong royong, dua pilar utama dari semangat Sumpah Pemuda. Ketika keberhasilan diukur secara personal,

semangat kolektif yang seharusnya menjadi fondasi bangsa mulai kehilangan relevansinya di kalangan generasi muda.

Pergeseran ke arah individualisme berdampak pada menurunnya solidaritas sosial di kalangan pemuda. Kepedulian terhadap lingkungan sekitar, keterlibatan dalam kegiatan sosial, dan rasa tanggung jawab terhadap kelompok atau bangsa mengalami penurunan. Banyak anak muda yang lebih memilih membangun karier dan pencitraan pribadi dibanding berkontribusi pada kegiatan kolektif yang tidak mendatangkan pengakuan langsung.

Fenomena ini terlihat dalam menurunnya minat terhadap organisasi kemasyarakatan atau kegiatan sukarelawan yang tidak viral. Ketika penghargaan sosial ditentukan oleh eksistensi digital, nilai kebersamaan menjadi semakin sulit dijaga. Padahal, sejarah perjuangan bangsa menunjukkan bahwa kekuatan kolektif pemuda—seperti dalam peristiwa Sumpah Pemuda—merupakan elemen kunci dalam menghadapi tantangan bersama. Tanpa solidaritas, semangat persatuan hanya akan menjadi slogan kosong yang tidak mengakar dalam tindakan nyata.

Menghadapi tantangan individualisme, perlu strategi penguatan nilai kolektif di kalangan pemuda. Pendidikan karakter yang menekankan nilai empati, kerja sama, dan tanggung jawab sosial harus diperkuat dalam kurikulum sekolah. Kegiatan kelompok seperti proyek sosial, live-in, atau pengabdian masyarakat dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan solidaritas dan rasa memiliki terhadap komunitas.

Selain itu, figur inspiratif yang menunjukkan keseimbangan antara pencapaian pribadi dan kontribusi sosial harus lebih banyak diangkat ke publik. Keteladanan semacam ini akan membantu membentuk narasi baru bahwa keberhasilan sejati bukan hanya soal individu, tetapi tentang seberapa besar kontribusi kita bagi sesama.

Peristiwa Sumpah Pemuda tidak lepas dari peran tokoh-tokoh kunci yang menjadi pelopor gerakan persatuan nasional. Salah satu tokoh sentral adalah Soegondo Djojopoespito, ketua Kongres Pemuda II, yang dengan kepemimpinannya berhasil

menyatukan berbagai organisasi kepemudaan lintas suku dan daerah. Ia dikenal karena kemampuannya membangun dialog dan menjembatani perbedaan demi satu tujuan bersama.

Mohammad Yamin, sebagai sekretaris kongres, memiliki kontribusi besar dalam merumuskan teks Sumpah Pemuda serta menggagas penggunaan Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Ia adalah salah satu tokoh awal yang menyadari pentingnya identitas nasional dalam perjuangan melawan kolonialisme.

Sementara itu, Ki Hajar Dewantara, meskipun tidak terlibat langsung dalam kongres, merupakan sosok penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan. Gagasannya tentang pendidikan yang memerdekakan menjadi pondasi dalam membangun kesadaran nasional di kalangan pemuda pada masa itu.

Di era modern, sejumlah tokoh muda juga menunjukkan semangat persatuan dan kontribusi sosial yang sejalan dengan nilai Sumpah Pemuda. Misalnya, Gita Syahrani, seorang aktivis lingkungan dan pengacara kebijakan publik, dikenal karena perjuangannya dalam isu keberlanjutan dan keadilan sosial lintas daerah di Indonesia. Melalui gerakan *sustainable development*, ia mendorong kolaborasi antargenerasi dan antarsektor.

Tokoh lain seperti Chiki Fawzi, seniman dan aktivis sosial, memanfaatkan seni dan media digital untuk menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman. Ia aktif mengkampanyekan toleransi, inklusivitas, serta kepedulian terhadap isu-isu sosial melalui platform kreatif yang dekat dengan generasi muda.

Selain itu, organisasi seperti BEM, Karang Taruna, dan GP Anzor juga terus mencetak kader-kader muda yang bergerak di bidang sosial, politik, dan pendidikan, membuktikan bahwa semangat kolektif masih tumbuh dalam berbagai bentuk baru.

Membandingkan tokoh-tokoh historis dan tokoh masa kini menunjukkan kesinambungan nilai meskipun dalam konteks tantangan yang berbeda. Tokoh 1928 berjuang menghadapi kolonialisme dan membangun identitas nasional,

sementara pemuda modern menghadapi tantangan globalisasi, krisis lingkungan, hingga polarisasi digital.

Namun, keduanya memiliki benang merah: semangat kolektif, kesadaran sosial, dan kontribusi nyata bagi bangsa. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa semangat Sumpah Pemuda bukan milik masa lalu, tetapi dapat terus hidup dan relevan jika diwujudkan dalam tindakan nyata oleh generasi sekarang.

Sumpah Pemuda tahun 1928 merupakan tonggak sejarah yang menegaskan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Tiga butir utama—satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa—menjadi fondasi identitas nasional yang hingga kini masih relevan. Para tokoh seperti Soegondo Djojopoespito, Mohammad Yamin, dan Ki Hajar Dewantara telah menunjukkan bahwa semangat kolektif pemuda mampu menghadapi tantangan besar seperti kolonialisme.

Namun, ketika nilai-nilai idealis tersebut dihadapkan pada realitas masa kini, muncul ketegangan antara semangat persatuan dan fenomena sosial kontemporer. Polarisasi politik, individualisme digital, serta pengaruh budaya global menjadi tantangan serius yang menggerus solidaritas di kalangan pemuda. Banyak pemuda aktif menyuarakan pendapat di ruang maya, tetapi belum sepenuhnya terlibat dalam aksi nyata yang membangun masyarakat.

Meskipun demikian, semangat Sumpah Pemuda tidak hilang. Ia hanya perlu direvitalisasi dan disesuaikan dengan zaman. Literasi digital, pendidikan karakter, penguatan identitas budaya lokal, serta dukungan terhadap gerakan pemuda menjadi strategi penting untuk menjaga nilai-nilai tersebut tetap hidup. Peran lembaga pendidikan, pemerintah, dan tokoh muda inspiratif sangat krusial dalam membimbing generasi baru agar tidak kehilangan arah dalam arus globalisasi.

Sebagai penutup, esai ini mengajak generasi muda untuk merefleksikan peran mereka dalam menjaga semangat Sumpah Pemuda. Persatuan bukanlah konsep abstrak, tetapi sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari—dari cara berinteraksi di media sosial, hingga kontribusi dalam komunitas lokal. Jika nilai-nilai ini terus dipraktikkan dan dikembangkan, maka semangat Sumpah Pemuda akan tetap

menyala, bukan sekadar dikenang setiap 28 Oktober, tetapi diwujudkan sepanjang tahun dalam tindakan dan pemikiran yang membangun bangsa.

Referensi:

Geli, A., Sumaryoto, S., & Sriyono, J. (2022). Peran pemuda dalam menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(1), 55–68. <https://doi.org/10.26740/jpk.v12n1.p55-68>

Halim, A., & Kuwado, F. J. (2019, Agustus 19). Kerusuhan Manokwari dipicu hoaks, polisi lakukan penyidikan digital forensik. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/19/16440031/kerusuhan-manokwari-di-picu-hoaks-polisi-lakukan-penyidikan-digital-forensik>

Suwarno. (2023). Pengaruh media sosial terhadap nasionalisme pemuda di era digital. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 18(2), 112–125. <https://journal.ui.ac.id/index.php/jkm/article/view/38712>

Triaristina, H., & Rhamadani, P. (2023). Revitalisasi nilai sumpah pemuda dalam pendidikan karakter di sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 28(3), 201–215. <https://ejournal.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/3021>

VOA Indonesia. (2023). Polarisasi politik picu ujaran kebencian di kalangan pemuda. *VOAIndonesia.com*. <https://www.voaindonesia.com/a/polarisasi-politik-picu-ujaran-kebencian-di-kalangan-pemuda/7020157.html>

Language Center Universitas Negeri Jakarta. (2023). Bahasa Indonesia dan tantangannya di era media sosial. <https://languagecenter.unj.ac.id/artikel/bahasa-di-era-media-sosial/>